

KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA TAHUN 2009 – 2015

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Shofia Taharah

Nomor Mahasiswa : 14313112

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

**KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2009 – 2015**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1

Jurusan Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Shofia Taharah

Nomor Mahasisw : 14313112

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2018

Penulis,

Shofia Fahrarah

PENGESAHAN SKRIPSI

KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2009 – 2015

Nama : Shofia Taharah
Nomor Mahasiswa : 14313112
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Abdul Hakim, S.E.,M.Ec.,Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2009-2015

Disusun Oleh : **SHOFIA TAHARAH**
Nomor Mahasiswa : **14313112**

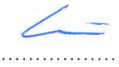
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 10 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.

.....


Penguji : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc

.....


Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

MAN JADDA WAJADA

“SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI BERHASIL”

MAN SHABARA ZHAFIRA

“SIAPA YANG BERSABAR PASTI BERUNTUNG”

MAN SARA ALA DARBI WASHALA

“SIAPA MENPAKI JALAN NYA AKAN SAMPAI KE TUJUAN”

PERSEMBAHAN

🚩 Mama dan Bapak

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur saya kepada Allah berada di tengah keluarga ini.. Terima kasih untuk segalanya ma pak. Doa, nasehat, motivasi, serta dukungan. Gelar ini saya persembahkan untuk kalian berdua, walaupun masih dibawah ekspektasi dan belum sebanding dengan apa yang telah kalian berikan.

🚩 Ibu dan Ayah

Terima kasih untuk ibu dan ayah saya ucapkan, saya semogakan dalam doaku. Terima kasih untuk doa, motivasi, dan apa yang telah kalian berikan kepada ku seperti anak sendiri

🚩 Adik

Sirlina Latifah, selalu mengingatkan dan mendukung apa yang kakak lakukan. Terima kasih selalu ada disetiap keadaan

🚩 Irsam Darma Putra

Terima kasih untuk waktu, dorongan, dan terus ada dari awal kuliah hingga sekarang. Semoga urusanmu juga dilancarkan.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di D.I Yogyakarta Tahun 2009-2015”. Shalawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Rasa syukur selalu penulis panjatkan karena atas ijin Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sehingga mampu memenuhi syarat untuk dapat meraih gelar sarjana strata-1 pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap terdapat ilmu yang bermanfaat dari skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, karena telah memberikan Rahmat, Karunia dan Keridhaan-Nya sehingga selama penulisan skripsi dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya yang terang benderang dan penuh ilmu seperti sekarang ini.

3. Kedua orang tua saya yang selalu saya sayangi. Terima kasih atas segala doa dan restu mama dan bapak.
4. Bapak Abdul Hakim, S.E.,M.Ec.,Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu dan waktunya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Dwi Praptono Agus Hardjito, M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi UII.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonhomi UII, khususnya yang ada di jurusan Ilmu Ekonomi.
7. Sirlina Latifah yang paling aku sayang walaupun kita sering berantem tapi selalu nemanin aku revisian
8. Irsam Darma Putra yang selalu mengingatkan dan member dukungan
9. Cely, Monik, Ceking, Awan, Wiwis, Amin, dan Karina yang memberikan motivasi dan dukungan
10. Sahabat-sahabat “Gandong” Enggi, Riry, Meme, Amin, Imam, Rizky, Agung, Resa, Arif, Fadhly, Ayut yang sudah menemani sejak semester 1 hingga sekarang, memberikan banyak pelajaran dan menemani menghadapi lika-liku perkuliahan, Terimakasih.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

Penulis menyadari, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada

kekurangan,sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 2018

Penulis,

Shofia Taharah

DAFTAR ISI

KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 – 2015.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 – 2015.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Pustaka	9

2.2	Landasan Teori.....	21
2.2.1.	Pertumbuhan Ekonomi	21
2.2.2	Kurva Inverted-U Kuznets.....	22
2.2.3	Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	23
2.2.4	Indeks Pembangunan Manusia	26
2.2.5	PDRB	29
2.2.6	Dana Alokasi Umum	35
2.2.7	Pendapatan Asli Daerah.....	36
2.3	Kerangka Pemikiran.....	39
2.4	Hipotesis:	40
METODOLOGI PENELITIAN.....		41
3.1	Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	41
3.2	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	42
3.3	Metode Analisis	43
3.3.1	Model Regresi Data Panel	43
3.3.2	Uji Statistik	47
HASIL DAN ANALISIS		50
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	50
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan	50
4.2.1	Pemilihan Model Regresi.....	50
4.3	Pengujian Hipotesis	56
4.3.1	Uji Overall (Uji F)	56
4.3.2	Uji Individu (Uji t).....	57

4.3.3	Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda Cross Section	59
4.4	Analisis Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.	62
4.4.1.	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.....	62
4.4.2	Analisis Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.....	63
4.4.3	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta	64
4.4.4	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta	65
KESIMPULAN DAN IMPILIKASI.....		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Implikasi	69
DAFTAR PUSTAKA		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D.I Yogyakarta Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha	3
Tabel 2.1	Kajian Pustaka.....	11
Tabel 4.1	Hasil Uji Chow.....	55
Tabel 4.2	Hasil Uji Hausman	56
Tabel 4.3	Hasil Regresi Fixed Effect	57
Tabel 4.4	Koefisien Determinasi.....	58
Tabel 4.5	Pengujian Hipotesis.....	59
Tabel 4.6	Cross Effect.....	61
Tabel 4.7	Nilai Koefisien dan Intersep.....	62
Tabel 4.8	Period Effect.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Indeks Gini.....	5
Gambar 2.1	Kurva Interved-U Kutnets	24
Gambar 2.2	Kurva Lorens	27
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 3.1	Model Regresi.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Data Skripsi
- II. Hasil Regresi *Common Effects Model*
- III. Hasil Regresi *Fixed Effects Model*
- IV. Hasil Regresi *Random Effects Model*
- V. Uji Chow
- VI. Uji Hausman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta. Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (*cross section*) yang diambil dari keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di D.I Yogyakarta, sedangkan data untuk data antar waktu (*time series*) diambil pada tahun 2009-2015 dimana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Data yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series* yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan program Eviews 8. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel indeks pembangunan manusia, PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta

Kata Kunci : Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Indeks Pembangunan Maausi, PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di suatu Negara memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kesejahteraan masyarakat di dalam suatu Negara dapat dilihat dari kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah juga bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian suatu wilayah dalam keadaan baik. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka menggambarkan bahwa perekonomian dalam keadaan yang tidak baik.

“Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut” (Todaro, 2003).

“Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan

pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen” (Sadono Sukirno 2006).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk menganalisa pembangunan yang terjadi di suatu daerah. Tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari indikator lain yakni indikator sosial. Contohnya adalah kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Negara tersebut yang dapat dilihat dari kenaikan kualitas pendidikan, kesehatan, kemudahan mengakses informasi. Pembangunan yang merata akan berimbas kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, setiap daerah dapat melihat sejauh mana tingkat pemerataan pembangunan di daerahnya dan memperhatikan masalah distribusi pendapatan yang ada di daerahnya tersebut.

Angka PDRB merupakan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Hal ini berarti semakin sejahtera penduduk suatu di suatu wilayah semakin tinggi PDRB nya. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi D.I Yogyakarta Atas Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Tahun	
2010	64 678 968.20
2011	68 049 874.44
2012	71 702 449.18
2013	75 627 449.59
2014	79 536 081.75
2015	83 474 440.55
2016	87 687 926.63

Sumber: BPS

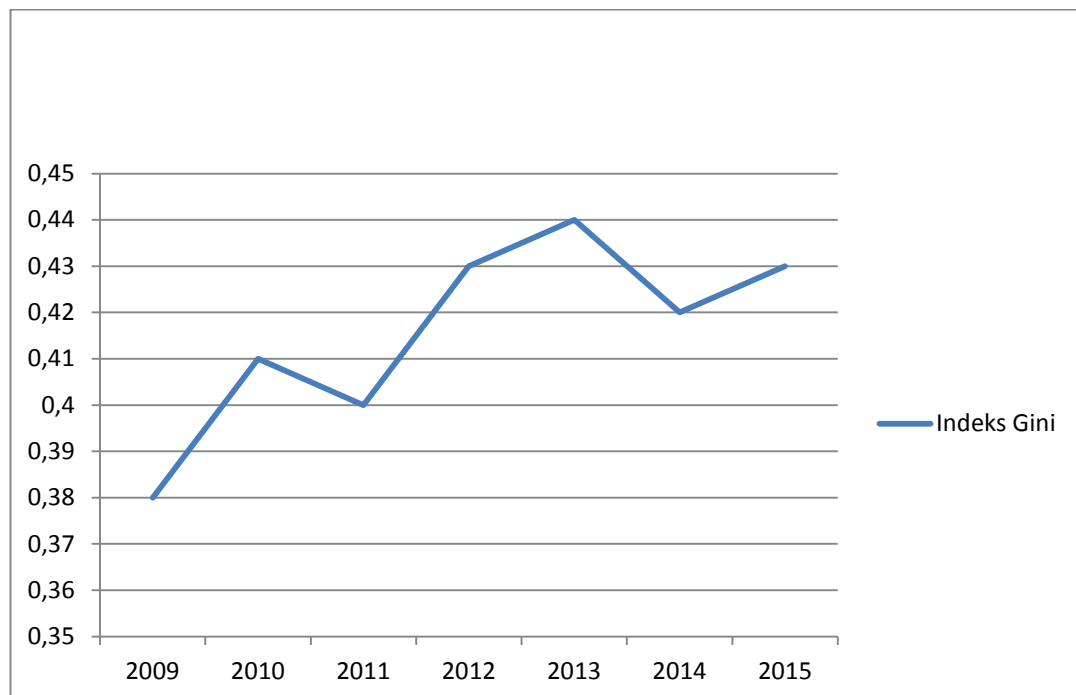
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2010 hingga tahun 2016 PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi D.I Yogyakarta menunjukkan angka yang semakin tinggi. Artinya perekonomian di Provinsi D.I Yogyakarta berjalan baik dan dapat di nilai bahwa masyarakat yang ada di dalam nya sejahtera. semakin sejahtera penduduk suatu di suatu wilayah semakin tinggi PDRB nya.. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang.

Seiring dengan gerak pembangunan yang dilakukan, ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kemiskinan menjadi lingkaran masalah yang sulit diatasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun angka kemiskinan masih tetap tinggi. Sulitnya mengurangi angka kemiskinan disebabkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

“Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menggambarkan bahwa hanya sebagian besar masyarakat yang terdiri dari karyawan dan buruh hanya menikmati sedikit dari pendapatan nasional” (Djojohadikusumo, 1954).

Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan permasalahan penting di suatu wilayah yang harus segera diatasi karena ketimpangan pendapatan dampaknya bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial.



Gambar 1.1 Indeks Gini

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan tersebut yaitu menggunakan ratio gini yang memiliki nilai 0 sampai dengan 1. Rasio gini kecil lebih kecil dari 0,4 menunjukkan ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Untuk melihat nilai rasio gini di provinsi D.I Yogyakarta berdasarkan pada kurun waktu 2009-2015, dapat di lihat pada gambar 1.1

Pada tahun 2009 indeks gini provinsi D.I Yogyakarta sebesar 0.38 ketimpangan yang terjadi termasuk ketimpangan rendah. Pada tahun 2010 indeks gini provinsi D.I Yogyakarta naik menjadi 0.41 ketimpangan yang terjadi pada tahun ini termasuk ketimpangan yang sedang kemudian pada tahun 2011 indeks gini provinsi D.I Yogyakarta turun menjadi sebesar 0.40 dan masih termasuk ketimpangan yang sedang. Tetapi pada 2 tahun selanjutnya berturut-turut indeks

gini provinsi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 0.43 sedangkan tahun 2013 naik lagi sebesar 0.44. Tahun 2014 indeks gini provinsi D.I Yogyakarta turun sebesar 0.42 dan pada tahun 2015 angka indeks gini provinsi D.I Yogyakarta naik kembali menjadi 0.43 ketimpangan pada tahun 2015 termasuk ketimpangan sedang.

Tingkat kesenjangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin tinggi. Bahkan kesenjangan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini berada di atas angka nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angka gini ratio provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 0,440, sedangkan nasional 0,391. Tingkat gini ratio di DIY meningkat dari 0,432 periode Maret 2017 naik menjadi 0,440 pada September 2017.

Melihat cukup besar dampak yang ditimbulkan akibat ketimpangan distribusi pendapatan, maka diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi D.I Yogyakarta. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang semakin parah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan diantaranya

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengambil judul dalam penelitian tentang, **“Ketimpangan Distribusi Pendapatan di provinsi D.I Yogyakarta”**

1.2. Rumusan Masalah

Oleh karena itu dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak -pihak lain yang berkepentingan, yaitu bagi :

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selain itu dari penelitian ini diharapkan penulis dapat mengerti faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan, memperluas dan memantapkan wawasan serta ketrampilan yang dapat membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.
3. Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan ekonomi pada suatu daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi penelitian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti dari penelitian terdahulu dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan perbandingan atau acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Kajian pustaka sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi dan pembanding dalam penelitian ini sehingga dalam bab ini akan memberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN yang dilakukan oleh sejumlah peneliti di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1	Valentiana dan Ketut (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah, 2. Dana Alokasi Umum, 3. Belanja Modal, 4. Ketimpangan distribusi pendapatan 	regresi linear berganda	PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan. Belanja modal negative terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
2	Pauzi dan Dewa (2016)	Faktor_Faktor yang Mempengaruhi Secara Langsung maupun Tidak Langsung Ketimpangan Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. :Ketimpangan Distribusi Pendapatan, 2. Ekspor, 3. Penanaman Modal Asing, 4. Pertumbuhan Ekonomi. 	Analisis jalur	Ekspor dan belanja modal tidak signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

3	Widiarnako (2013)	Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 1990-2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk 2. sumbangan sektor pertanian 3. sektor pertambangan dan galian 4. sektor industri, 5. sektor listrik gas dan air minum, 6. sektor bangunan, 7. sektor perdagangan, 8. sektor angkutan, 9. ektor bank dan lembaga keuangan dan 10. sektor jasa-jasa 	Model regresi linier berganda.	Semua sector regresif dan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
4	Eka dan Syamsul (2014)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi, 2. produktivitas tenaga kerja, 3. investasi 4. IPM 	Time series	pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara signifikan.
5	Wahyunida (2012)	Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan Pendapatan 2. Pendidikan 3. Gender, 4. Tenaga Kerja 	oLS dan regresi kuantil	Semua variable berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
6	Nurlaili (2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketimpangan distribusi pendapatan, 2. PDRB per kapita, 3. Populasi penduduk, 4. tingkat pengangguran terbuka, 5. derajat desentralisasi fiskal 	Data panel -fixed effect model.	PDRB per kapita, populasi penduduk, dan TPT berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.
7	Yuliani (2014)	Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi, 2. ketimpangan pendapatan 	Indeks Williamson Koefisien Gini , Indeks Kuznets, Indeks Oshima, dan Indeks Entropi Theil	nilai Indeks Williamson mengalami peningkatan - menggunakan Indeks Entropy Theil menunjukkan nilai indeks entropi theil

					distribusi pendapatan semakin merata dari tahun ketahun. pertumbuhan ekonomi dan indeks Williamson nilai korelasi negatif
8	Bantika (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Jumlah penduduk 	regresi linier berganda.	Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan
9	Aulia (2012)	Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desentralisasi fiskal 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Kemiskinan 4. Kesenjangan pendapatan 	Metode analisis digunakan analisis deskriptif kualitatif dan korelasi kanonikal	signifikan antara variabel dependen kemandirian fiskal, dengan variabel independen pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan
10	Musfidar (2012)	Faktor_Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Ditribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Ketimpangan distribusi pendapatan 3. Populasi 4. UMR 5. Kontribusi output industri 	Time series	Populasi dan Kontribusi sektor industri pengaruh langsung positif dan signifikan. UMR pengaruh langsung negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 2.Populasi dan Kontribusi sektor industri berpengaruh secara positif UMR berpengaruh secara negative terhadap pertumbuhan ekonomi
11	Bagus	Pengaruh IPM, Biaya Infrastuktur, Investasi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketimpangan distribusi pendapatan 	metode pengumpulan data observasi	Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki

		Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Bali	<ol style="list-style-type: none"> 2. IPM 3. biaya infrastruktur 4. Investasi 5. pertumbuhan ekonomi 	non partisipan	pengaruh langsung dan signifikan. IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan
12	Krisnantia (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Antar Wilayah Di Provinsi Jawa Timur Dan D.I Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan antar wilayah, 2. Investasi, 3. Aglomerasi, 4. Tingkat Pengangguran. 	-Indeks gini -deskripsi -kolerasi pearson	investasi, aglomerasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan lemah terhadap ketimpangan antar wilayah.
13	Sudarlana (2011)	Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, Dan Kemiskinan Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Kemiskinan 3. Ketimpangan Pendapatan 	persamaan simultan dengan menggunakan teknik (2SLS)	Ketimpangan pendapatan memp. dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistic. -Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif, tetapi penduduk miskin tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. - Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh pada penduduk miskin di Indonesia.
14	Tristyana (2009)	Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Kredit Bank, Jumlah Penduduk, Investasi, Pengeluaran Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan distribusi pendapatan 2. Kredit bank 3. Jumlah penduduk 4. Investasi 5. Pengeluaran pemerintah 		keimpangan distribusi pendapatan, kredit bank, jumlah penduduk, investasi dan pengeluaran pemerintah semua berpengaruh

		Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DIY			positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
15	Hidayat (2014)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Investasi 3. IPM 4. Ketimpangan Pendapatan antar Daerah 	metode (Fixed Effect Model).	pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak berpengaruh signifikan sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah.
16	Bagus (2017)	Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketimpangan distribusi pendapatan 2. IPM 3. biaya infrastruktur 4. investasi 5. pertumbuhan ekonomi 	metode pengumpulan data observasi non partisipan	Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung dan signifikan. IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan
17	Holifah (2017)	Factor-faktor ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2012- 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Ipm 3. Jumlah penduduk 4. Industry 5. Ketimpangan pendapatan 	Random Effect Model	Pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak berpengaruh signifikan, jumlah penduduk dan industry berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan
18	Setiyono (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi, 2. distribusi pendapatan 	metode analisis statistik non- parametris Spearman Rank	analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan adalah positif dan signifikan
19	Parhah (2006)	Pengaruh variabel makroekonomi terhadap ketimpangan distribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inflasi 2. Tax ratio 3. tingkat pengangguran pengeluaran 	fixed effect model	inflasi dan tax ratio mempunyai efek progresif, tingkat pengangguran,

		pendapatan di Indonesia	4. pembanguna 5. PDRB perkapita		pengeluaran pembangunan, dan PDRB perkapita mempunyai efek regresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
20	Soemartin dan Enny (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Melalui Korelasi Kanonik	1. Korelasi kanonik 2. Indeks Gini 3. Williamson		Melalui korelasi kanonik dapat dilihat derajat hubungan antara indeks Gini dan indeks Williamson sebagai gugusan variabel respon dengan gugusan variabel prediktor yakni kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan investasi
21	Nalim (2014)	Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Padang	1. pendidikan 2. kesehatan 3. pengangguran 4. ketimpangan pendapatan	Regresi Linear Berganda	Pendidikan, kesehatan, Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
22	Hartini (2017)	Pengaruh PDRB PerKapita, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TAHUN 2011-2015	1. PDRB per kapita 2. Investasi 3. IPM	fixed effect model.	PDRB Per Kapita, investasi berpengaruh positif dan signifikan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
23	Krisnantia (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Antar Wilayah	1. Ketimpangan antar wilayah 2. Indeks	-Indeks gini -deskripsi -kolerasi	investasi, aglomerasi dan tingkat

		Di Provinsi Jawa Timur Dan D.I Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 3. Korelasi Pearson 4. Investasi, Aglomerasi 5. Tingkat Pengangguran. 	pearson	pengangguran memiliki hubungan lemah terhadap ketimpangan antar wilayah.
24	Achmad Hendra Setiawan, S.E.,M.Si	Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribus Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin D Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Gini 2. Indeks Wiliamson 	Regresi linear berganda	Indeks Gini dan Indeks Williamson memiliki hasil yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin
25	Devi (2006)	Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju pertumbuhan penduduk 2. pengeluaran pemerintah 3. investasi 	model ekonometrika. digunakan metode OLS	laju pertumbuhan penduduk pengaruh yang negatif yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah dan investasi pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi
26	Muara (2015)	Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMP 2. Belanja modal 3. Investasi 4. Struktur ekonomi 	model semi log pada regresi data panel	PDRB dari Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan juga Kredit Investasi berhubungan negative. PDRB sektor industri positif terhadap ketimpangan pendapatan.
27	Doni dan Rokhedi (2013)	Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia 2006-2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketimpangan pendapatan 2. Indeks Williamson 3. Indeks Entropi Theil 4. Tipologi Klassen 	metode uji Kolmogorov Smironov	Berdasarkan hasil diperoleh tingkat ketimpangan tahun 2006 - 2011 menunjukkan perubahan ketimpangan yang signifikan Indeks Williamson s, tingkat ketimpangan

					pendapatan yang ada di Indonesia selama periode penelitian tergolong tinggi
28	Ngakan (2013)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotesis Kuznets 2. Ketimpangan 3. Pertumbuhan ekonomi. 	Tipologi Klassen	Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gianyar periode 1993-2000 antar kecamatan pada periode tersebut mengalami peningkatan.
29	Yunita (2014)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Povinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimoangan distribusi pendapatan 2. Pertumbuhan ekonomi 	random effect	pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap gini ratio
30	Ayu (2014)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan 2. PDRB 3. jumlah penduduk. 	Indeks Williamson	hubungan positif yang signifikan antara PDRB per kapita dengan ketimpangan pendapatan.
31	Agusalim (2016)	Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Ketimpangan Pendapatan 3. Desentralisasi 	Regresi Data Panel, <i>fixed effect</i>	pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap indeks gini sebelum diterapkan desentralisasi fiscal. pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks gini setelah diberlakukannya desentralisasi.
32	Nurul Rahmawati (2013)	Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat 2008-2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi 2. sector pertanian, industry, jasa 3. tingkat pendidikan pekerja 	Regresi Data Panel, <i>fixed effect</i>	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, sektor industri berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. sektor jasa dan tingkat

					pendidikan pekerja meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan
33	Marsi Fitriani, dkk (2015)	Analisis Pengaruh <i>Aggregat Demand</i> dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. investasi 2. pendidikan 	. Regresi Data Panel, <i>fixed effect</i>	Variabel Investasi dan Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
34	Aisyah (2003)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus 26 Provinsi di Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendapatan per kapita 2. pendidikan 	Metode Data Panel, <i>fixed effect</i>	Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan dan hubungannya adalah positif. Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan.
35	Linda (2007)	Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. sector ekonomi, pertanian, industry dan pengolahan, perdagangan 	Analisis Location Quotient dan Indeks Williamson	Dari hasil analisis LQ sektor-sektor basis perekonomian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan hasilnya adalah bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan memberikan

					dampak negatif terhadap ketimpangan dan menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur
36	Annisa (2007)	Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2010-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Sector pertanian 3. Sector perdagangan 	Regresi data panel, <i>fixed effect</i>	-PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan -PDRB sektor perdagangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan
37	Gusti (2014)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi 2. Pengeluaran pemerintah 	Regresi Linier Berganda	Dari hasil regresi didapatkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali
38	Danawati (2013)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi 2. Pengeluaran pemerintah 	Metode Analisis Jalur dengan AMOS	Hasilnya variabel bebas investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
39	Adhitya (2017)	Dampak Transfer Pemerintahan Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana alokasi umum 	Regresi Data Panel, <i>fixed effect</i>	Hasilnya variabel Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

40	Mega (2016)	Analisis Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB per kapita 2. Ipm 3. Jumlah penduduk 	Metode fixed effect	Pdrb dan ipm signifikan terhadap disparitas pendapatan sedangkan jumlah penduduk tidak signifikan
----	-------------	---	--	---------------------	---

Penelitian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sejumlah peneliti secara umum menggunakan metode *fixed effect*, *random effect*, *regresi linear berganda*, *indeks wiliamsom*, *time series*, *regresi Ordinary Least Square (OLS)*, *analisis jalur*, *deskriptif kuantitatif*. Namun dari semua metode tersebut, metode *fixed effect* paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Ani Nurlaili tahun 2014 yang meneliti analisis factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2007-2013. Metode ini sama dengan yang digunakan oleh Muhammad Haris Hidayat tahun 2013 yang melakukan penelitian analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2012. Siti Parhah juga menggunakan metode *fixed effect* dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh variabel makroekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan metode yang sama Nita Tri Hartini tahun 2015 melakukan penelitian pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan IPM, terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2011-2015. Nurul Rahmawati tahun 2013 melakukan penelitian Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat 2008-2011 menggunakan metode *fixed effect*. Tiga orang lainnya seperti Marsi Fitriani dalam penelitiannya Analisis

Pengaruh *Aggregat Demand* dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh, Aisyah tahun 2003 melakukan penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia, dan Mega 2013 meneliti analisis disparitas pendapatan di provinsi Jawa Barat juga menggunakan metode *fixed effect*.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti peneliti tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, IPM, investasi, pertumbuhan ekonomi, PDRB, produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peneliti lain seperti Holifah melakukan penelitian dengan metode yang berbeda dari peneliti sebelumnya yaitu menggunakan metode *random effect* yang menunjukkan hasil bahwa variabel IPM dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan variabel jumlah penduduk dan industry berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ni Putu Valentina dan Ketut melakukan penelitian ketimpangan distribusi pendapatan di Bali dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan metode Regresi Linear Berganda hasilnya menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan Belanja modal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ahmad Pauzi dan Dewa dengan menggunakan metode *analisis jalur* melakukan penelitian di provinsi Bali yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel ekspor dan penanaman modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh

signifikan ketimpangan distribusi pendapatan. Diah dan ida meneliti ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan metode *pengumpulan data observasi non partisipan* yang hasilnya variabel biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan sedangkan variabel IPM dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

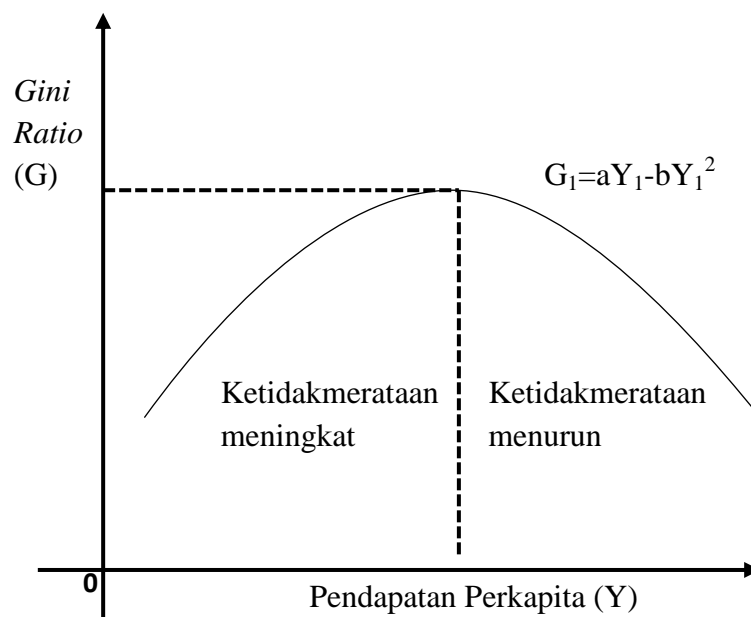
2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka. "Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara"(Sukirno, 2002).

2.2.2 Kurva Inverted-U Kuznets

Kuznets membuat hipotesis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan membentuk kurva U-terbalik (*inverted-U curve*). Studi empiris yang dilakukan dengan menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang. Hipotesa Kuznets bersandar pada asumsi bahwa terdapat dua sektor ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional di perdesaan dengan pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah dan sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan dengan pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan yang tinggi.



Gambar 2.1 Kurva Inverted-U Kuznets

Kuznets menekankan adanya perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor industri dan jasa cenderung berkembang dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa

transisi tersebut, produktivitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan perkapita yang diterima juga lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut meningkat. Pada awal pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita masih rendah dan kesenjangan pendapatan yang juga rendah, kesenjangan pendapatan semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita.

2.2.3 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan factor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

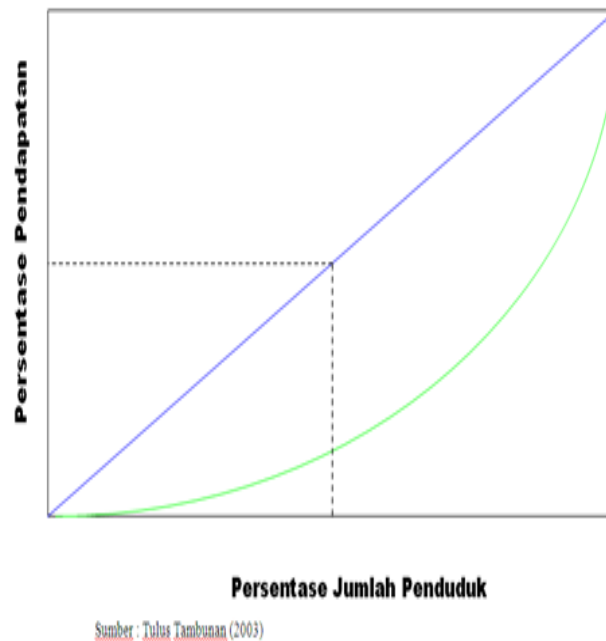
“Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu, distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak adalah presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya.” (Sukirno, 2006).

“Pemerataan pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi. Pertama pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat. Kedua, pembagian pendapatan antar daerah, yaitu daerah perkotaan dan pedesaan. Ketiga pembagian pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antar kabupaten/kota” (Dumairy, 1996).

Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu :

2.2.3.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dalamnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.



Gambar 2.2 Kurva Lorenz

2.2.3.2 Indeks Gini atau Rasio Gini

Indeks Gini (rasio gini) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). “Indeks Gini didapatkan dengan cara menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujursangkar dimana kurva Lorenz tersebut berada” (Lincoln Arsyad, 2010). Bila Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Secara khusus, indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembanguna untuk hidup layak.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek

huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli.

a. Angka harapan hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu anak lahir hidup dan anak masih hidup.

b. Tingkat pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

2.2.4.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Williamson dengan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari nilai IPM.

Mega (2016) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Jika IPM naik maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan sebaliknya jika angka IPM menurun maka ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

2.2.5 PDRB

1. Wilayah Domestik dan Regional

Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

2. Produk Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri.

3. Produk Regional

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-

komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

5. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

6. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang,

hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.

7. Pendapatan Regional

Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional.

8. Pendapatan Regional Perkapita

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita

2.2.5.1 Perhitungan PDRB

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalan

- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas dan Air Bersih
- Konstruksi
- Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- pengeluaran konsumsi pemerintah
- pembentukan modal tetap domestik bruto
- perubahan inventori, dan
- ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

2.2.5.2 Hubungan PDRB dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

“Pembangunan di suatu Negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya kesenjangan ekonomi diantara warganya. Dalam analisisnya Kuznet menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yang menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada tahap tahap berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita” (Lincoln, 2010).

Penelitian Ida Ayu Indah menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika terjadi kenaikan pada PDRB maka pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat masalah pengangguran dan kemiskinan harus di atasi agar mengurangi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu wilayah.

2.2.6 Dana Alokasi Umum

Halim (2002) menyatakan: "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

2.2.6.1 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang juga mempunyai kontribusi paling besar dari total penerimaan daerah. DAU adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang

bertujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Menurut Ni Putu dan Ketut, dengan adanya dana alokasi umum yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Pemberian DAU oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah. DAU dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa DAU lebih digunakan untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin. Alokasi DAU untuk belanja pembangunan memungkinkan sesuatu daerah untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain belanja pembangunan, belanja modal juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

2.2.7 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaab milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain lain pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

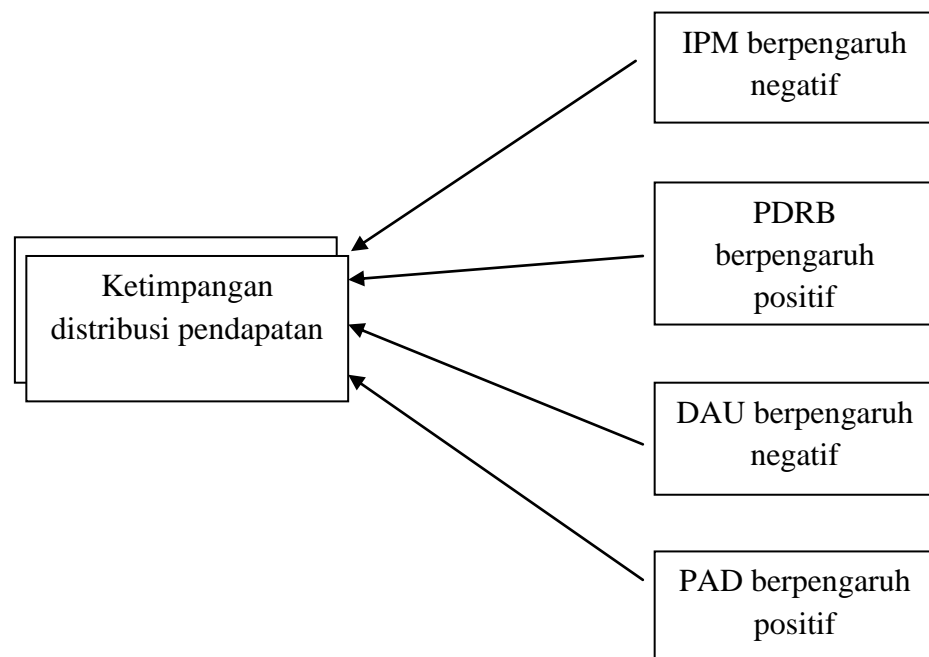
2.2.7.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Ni Putu dan ketut, peran pendapatan asli daerah yaitu sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah Karen merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin besar antar daerahnya. Berdasarkan data BPS D.I Yogyakarta PAD provinsi D.I Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini memberikan pengaruh positif terhadap masing-masing daerah di provinsi D.I

Yogyakarta, akan tetapi tingkat ketimpangan di masing-masing daerah masih sangat terlihat jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dan perimbangan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan rangkuman dari seluruh dasar – dasar teori yang ada dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka penelitian ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3

2.4 Hipotesis:

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta
2. PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel Di Provinsi D.I Yogyakarta pada kurun waktu dari tahun 2009-2015. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud dalam kumpulan angka-angka. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang sudah diolah. Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (*cross section*) yang diambil dari keseluruhan Kabupaten yang ada di Provinsi D.I Yogyakarta, sedangkan untuk data antar waktunya (*time series*) diambil pada tahun 2009-2015, dimana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Data yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel.

Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi observasi setiap individu dalam sampel. Keuntungan menggunakan panel data yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi dan mempebesar *degree of freedom*, serta pengabungan informasi yang berkaitan dengan variabel *cross section* dan *time series*.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau Negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan factor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Data diambil dari tahun 2009-2015 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Data IPM (%persen) diambil dari tahun 2009-2015 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta.
3. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah penerimaan dari daerah sendiri atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu atas dasar biaya faktor. Data PDRB (juta rupiah) diambil dari tahun 2009-2015 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta.
4. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data DAU (ribu rupiah) diambil

dari tahun 2009-2015 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta.

5. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaab milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah. Data PAD (ribu rupiah) diambil dari tahun 2009-2015 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta.

3.3 Metode Analisis

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan program Eviews 8.

3.3.1 Model Regresi Data Panel

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it}$$

Keterangan :

Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

β_0 = koefisien intersep

β_1 = koefisien pengaruh IPM

β_2 = koefisien pengaruh PDRB

β_3 = koefisien pengaruh DAU

β_4 = koefisien pengaruh PAD

i = kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta

t = waktu (tahun 2009-2015)

U_t = variabel pengganggu

Adapun tiga model pendekatan atau langkah – langkah dalam melakukan regresi adalah sebagai berikut :

1. *Common Effect Models (CEM)*

Merupakan pendekatan yang paling sederhana yang disebut CEM atau *pooled least square*, dimana pada model ini maka diasumsikan intersep masing – masing koefisien adalah sama, begitu pula slope koefisien pada data *cross section* dan *time series*nya.

Berdasarkan asumsi tersebut maka persamaan model Cem dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

2. *Fixed Effect Models (FEM)*

Merupakan pendekatan dimana salah satu cara untuk memperhatikan unit cross section pada model regresi data panel adalah dengan memperoleh nilai intersep yang berbeda – beda pada setiap unit cross section tetapi masih mengasumsikan slope koefisien yang tetap. Maka persamaan model FEM adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \sum_{j=1}^{n=25} \alpha_j D_j + u_{it}$$

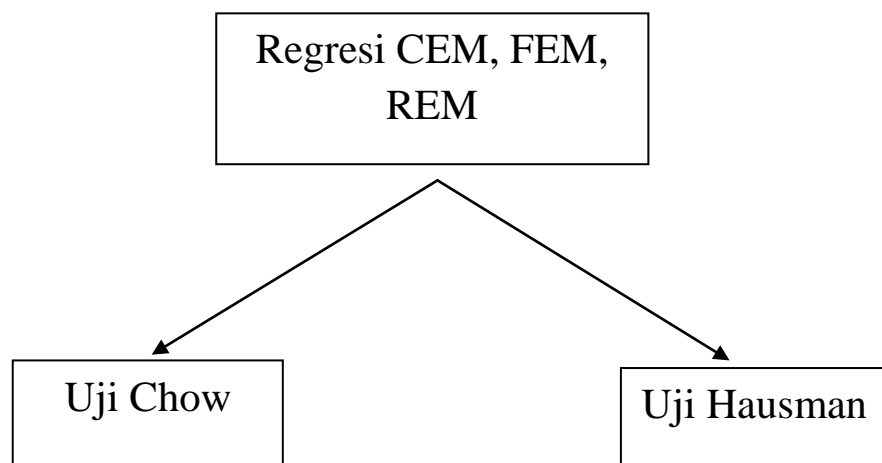
3. *Random Effect Models (REM)*

Pada model REM, diasumsikan α_i merupakan variabel random dengan mean α_0 , sehingga intersep dapat diasumsikan sebagai $\alpha_1 = \alpha_i + e_i$, dimana e_i merupakan error random yang mempunyai mean 0 dan varians e_i

tidak secara langsung diobservasi atau disebut juga variabel laten. Persamaan model REM adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

Dalam menentukan estimasi model regresi data panel dilakukan beberapa uji untuk memilih metode pendekatan estimasi yang sesuai dan menghasilkan regresi yang baik. Langkah – langkah yang dilakukan untuk memperoleh model yang tepat pertama dilakukan adalah dengan melakukan regresi dengan menggunakan regresi dengan model CEM dan FEM yang kemudian melakukan test dengan menggunakan uji Chow sehingga didapatkan hasil regresi yang baik dari kedua model tersebut. Apabila yang baik adalah FEM maka akan dilakukan test kembali dengan menggunakan uji Hausman untuk menentukan model yang tepat adalah model FEM atau REM.



Gambar 3.1 Model Regresi

- Uji Chow dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model *common effect* dengan model *fixed effect* dengan uji hipotesis sebagai berikut:

Untuk melakukan uji pemilihan estimasi *Common Effect* atau estimasi *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan melihat p-value apabila signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sedangkan apabila p-value tidak signifikan ($\geq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model *Common Effect*.

$$\frac{(SSE1 - SSE2)/(n - 1)}{SSE2/((nt - n - k))}$$

- Uji Langrange Multipler (LM) atau lengkapnya The Breusch-Pagan LM Test. Digunakan untuk memilih model *Common Effect* (tanpa variabel *dummy*) atau model *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Metode *Breusch Pagan* untuk uji signifikan *Random Effect* didasarkan pada nilai *residual* dari metode *OLS*.

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T e_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e^2_{it}} - 1 \right]^2$$

- Uji *Hausman* digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect*. Untuk melakukan uji *Hausman* maka dapat melihat dari nilai *P-value*. Apabila *p-value* signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*. Sebaliknya bila *p-value* tidak signifikan ($\geq 5\%$), maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effect*.

$$m = \hat{q} \text{Var}(\hat{q}) - 1 \hat{q}$$

3.3.2 Uji Statistik

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam hal ini mengukur seberapa besar proporsi variasi variable dependen dijelaskan oleh semua variable independen, atau mengukur sejauh mana persentase model regresi mampu menerangkan variasi variable dependennya.

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS-SSR}{TSS} = 1 - \frac{SSR}{TSS}$$

2. Uji Overall (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen.

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2013: 65). Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Ha: minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Dengan membandingkan nilai prob f-stat dengan α ($0,05=5\%$), jika prob f-stat $< \alpha$ maka menolak H_0 maka variabel independen secara serentak

mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila $\text{prob } f\text{-stat} > \alpha$ maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t statistik)

Untuk menguji pengaruh variable independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

a. Untuk variable Indeks Pembangunan Manusia (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y

$H_a : \beta_1 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif variabel X1 terhadap variabel Y

b. Untuk variable PDRB (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y

$H_a : \beta_2 < 0$, yaitu terdapat pengaruh negatif variabel X2 terhadap variabel Y

c. Untuk Dana Alokasi Umum (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y

$H_a : \beta_3 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif variabel X3 terhadap variabel Y

d. Untuk Pendapatan Asli Daerah (X4)

$H_0 : \beta_4 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh variabel X4 terhadap variabel Y

$H_a : \beta_4 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif variabel X4 terhadap variabel Y

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai prob t-stat dengan $\alpha = 1\%, 5\%, 10\%$, jika prob t-stat $< \alpha$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila prob t-stat $> \alpha$ maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Skripsi ini meneliti mengenai analisis ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menggunakan model data panel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersebut bentuk *cross section* serta data *time series* setiap Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2009- 2015. Data yang dipakai meliputi data indeks gini menurut Kabupaten/ Kota, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang dapat digunakan dalam regresi yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Adapun untuk memilih model mana yang tepat untuk digunakan maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Hasil pemilihan model sebagai berikut:

1. Common Effect Models

Method: Pooled Least Squares
 Date: 02/13/18 Time: 14:26
 Sample: 2009 2015
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

IPM?	0.003701	0.000430	8.596820	0.0000
PDRB?	1.85E-09	2.89E-09	0.641767	0.5257
DAU?	5.49E-11	5.60E-11	0.980410	0.3345
PAD?	8.86E-11	1.31E-10	0.674793	0.5048
R-squared	0.509024	Mean dependent var		0.360857
Adjusted R-squared	0.461510	S.D. dependent var		0.068487
S.E. of regression	0.050257	Akaike info criterion		-3.036132
Sum squared resid	0.078298	Schwarz criterion		-2.858378
Log likelihood	57.13231	Hannan-Quinn criter.		-2.974771
Durbin-Watson stat	1.036653			

2. Fixed Effect Model

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled Least Squares
Date: 02/13/18 Time: 14:35
Sample: 2009 2015
Included observations: 7
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.683594	0.308936	2.212736	0.0359
IPM?	-0.007915	0.003928	-2.014824	0.0544
PDRB?	1.25E-08	2.72E-09	4.592258	0.0001
DAU?	2.90E-10	9.51E-11	3.046049	0.0053
PAD?	-4.38E-10	1.48E-10	-2.955507	0.0066
Fixed Effects (Cross)				
_KOTA_JOGJA—C	0.159733			
_SLEMAN—C	-0.027537			
_BANTUL—C	-0.033970			
_KULONPROGO—C	0.032987			
_GUNUNGKIDUL—C	-0.131213			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.844575	Mean dependent var	0.360857
Adjusted R-squared	0.796752	S.D. dependent var	0.068487
S.E. of regression	0.030876	Akaike info criterion	-3.900651
Sum squared resid	0.024786	Schwarz criterion	-3.500704
Log likelihood	77.26139	Hannan-Quinn criter.	-3.762589
F-statistic	17.66043	Durbin-Watson stat	1.801157
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Random Effect Model

Dependent Variable: IG?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/13/18 Time: 14:34
 Sample: 2009 2015
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 35
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.307095	0.155980	1.968812	0.0583
IPM?	-7.56E-05	0.001936	-0.039042	0.9691
PDRB?	2.81E-09	1.84E-09	1.529000	0.1367
DAU?	-3.51E-11	5.72E-11	-0.613033	0.5445
PAD?	1.95E-10	9.70E-11	2.007560	0.0538
Random Effects (Cross)				
_KOTA_JOGJA--C	3.34E-15			
_SLEMAN--C	-2.99E-15			
_BANTUL--C	-4.20E-16			
_KULONPROGO--C	2.54E-15			
_GUNUNGKIDUL--C	-2.48E-15			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.46E-09	0.0000
Idiosyncratic random			0.030876	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.532196	Mean dependent var		0.360857
Adjusted R-squared	0.469822	S.D. dependent var		0.068487
S.E. of regression	0.049867	Sum squared resid		0.074603
F-statistic	8.532339	Durbin-Watson stat		0.995170
Prob(F-statistic)	0.000101			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.532196	Mean dependent var		0.360857
Sum squared resid	0.074603	Durbin-Watson stat		0.995170

4. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model *common effect* dengan model *fixed effect* dengan uji hipotesis berikut:

H_0 : memilih menggunakan estimasi model *common effect*

H_a : memilih menggunakan estimasi model *fixed effect*
 Untuk melakukan uji pemilihan estimasi *Common Effect* atau estimasi *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apabila signifikan ($<\alpha 5\%$) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, sedangkan apabila *p-value* tidak signifikan ($>\alpha 5\%$) maka model yang digunakan adalah *Common Effect*.

Tabel 4.1
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.063984	(4,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	38.566085	4	0.0000

Sumber, data diolah

Nilai probabilitas *cross section* dari pengujian uji Chow menggunakan Eviews 8 adalah sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$ maka hasilnya signifikan sehingga menolak H_0 dan gagal menolak H_a . Sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

5. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang terbaik diantara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* dengan uji hipotesis berikut:

H_0 : memilih menggunakan model estimasi *Random Effect*

H_a : memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*

Untuk melakukan uji pemilihan estimasi *Fixed Effect* atau estimasi *Random Effect* dapat dilakukan dengan melihat p- value. Jika p- value $< \alpha$ 5% maka signifikan sehingga estimasi yang tepat untuk digunakan adalah estimasi *Fixed Effect* sedangkan apabila p- value $> \alpha$ 5% maka tidak signifikan sehingga estimasi yang tepat untuk digunakan adalah estimasi *Random Effect*.

Tabel 4.2
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	52.255936	4	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian uji Hausman menggunakan *Eviews 8*. Nilai probabilitas cross section sebesar $0.0000 < \alpha$ 5% yang artinya signifikan sehingga menolak H_0 dan gagal menolak H_a maka model yang tepat untuk digunakan adalah model *Fixed Effect*.

3. Estimasi *Fixed Effect*

Estimasi *Fixed Effect* adalah teknik pengestimasiian untuk menangkap perbedaan intersep antar variabel namun dengan intersep waktu yang sama. Selain itu, model ini juga dapat mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar variabel dan antar waktu.

Tabel 4.3
Hasil Regresi Fixed Effect

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled Least Squares
Date: 02/13/18 Time: 14:35
Sample: 2009 2015
Included observations: 7
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.683594	0.308936	2.212736	0.0359
IPM?	-0.007915	0.003928	-2.014824	0.0544
PDRB?	1.25E-08	2.72E-09	4.592258	0.0001
DAU?	2.90E-10	9.51E-11	3.046049	0.0053
PAD?	-4.38E-10	1.48E-10	-2.955507	0.0066

Sumber :data dioalah

$$Y_{it} = 0.683594 - 0.00 X_{1it} + 1.25X_{2it} + 2.90 X_{3it} - 4.38 X_{4it} + U_{it}$$

Keterangan:

Y : indeks gini menurut Kabupaten/ Kota

β_0 : Koefisien Intersep

β_1 :Koefisien Pengaruh X1 (Indeks Pembangunan Manusia)

β_2 :Koefisien Pengaruh X2 (PDRB)

β_3 :Koefisien Pengaruh X3 (Dana Alokasi Umum)

β_4 : Koefisien Pengaruh X4 (Pendapatan Asli Daerah)

4.3 Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.4
Koefisien Determinasi dan Uji Overall

R-squared	0.844575
Adjusted R-squared	0.796752
S.E. of regression	0.030876
Sum squared resid	0.024786
Log likelihood	77.26139
F-statistic	17.66043
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : data diolah

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0.796752 yang artinya sebanyak 79,67% variasi atau perubahan pada variabel ketimpangan distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah sedangkan sisanya sebesar 20,33% dijelaskan oleh sebab lain di luar model.

4.3.1 Uji Overall (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak mempengaruhi.

F statistic sebesar 17.66043 dengan probabilitas $0.000000 < \alpha 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota

4.3.2 Uji Individu (Uji t)

Tabel 4.5
Pengujian Hipotesis

Variabel	Coefficient	Prob	Keterangan
IPM	-0.007915	0.0544	Signifikan
PDRB	1.25E-08	0.0001	Signifikan
DAU	2.90E-10	0.0053	Signifikan
PAD	-4.38E-10	0.0066	Signifikan

Sumber: data diolah

1. Indeks Pembangunan Manusia

Koefisien dari variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebesar -0.007915 dan probabilitas sebesar $0.0544 < \alpha 5\%$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a . Hal ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik sebesar 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.007915.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Koefisien dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebesar $1.25E-08$ dan probabilitas sebesar $0.0001 < \alpha < 5\%$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a . Hal ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik sebesar 1 juta rupiah maka ketimpangan distribusi pendapatan akan naik sebesar $1.25E-08$.

3. Dana Alokasi Umum

Koefisien dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar $2.90E-10$ dan probabilitas sebesar $0.0053 < \alpha < 5\%$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a . Hal ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, jika Dana Alokasi Umum naik sebesar 1 ribu rupiah maka ketimpangan distribusi pendapatan akan naik sebesar $2.90E-10$.

4. Pendapatan Asli Daerah

Koefisien dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar $-4.38E-10$ dan probabilitas sebesar $0.0066 < \alpha 5\%$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a . Hal ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah naik sebesar 1 ribu rupiah maka ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar $4.38E-10$.

4.3.3 Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda Cross Section

Persamaan estimasi dengan mempertimbangkan *cross effect* dapat dilakukan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien *cross effect*. *Cross effect* diperoleh berdasarkan estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam penelitian, maka sesungguhnya koefisien tersebut akan dimiliki oleh masing masing unit atau individu.

Tabel 4.6
Cross Effect

CROSSID	EFFECT
KOTA JOGJA	0.159733
SLEMAN	-0.027537
BANTUL	-0.033970
KULONPROGO	0.032987
GUNUNGKIDUL	-0.131213

Sumber: data diolah

Tabel 4.7
Nilai Koefisien dan Intersep

Kabupaten/ Kota	Intersep	C	Konstanta
Kota Jogja	0.159733	0.683594	0.843327
Sleman	-0.027537		0.656057
Bantul	-0.033970		0.649624
Kulonprogo	0.032987		0.716581
Gunungkidul	-0.131213		0.552381

Dari hasil tersebut dapat dilihatnya besarnya ketimpangan distribusi pendapatan yang dihasilkan tiap Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Intersep yang dimiliki masing masing Kabupaten/ Kota pada penelitian ini berbeda beda hal ini menunjukkan kemampuan dalam pengimplementasian variabel independen dalam peran meningkatkan nilai ketimpangan distribusi pendapatan berbeda beda. Hasil dari penjumlahan intersep dan koefisien dapat diketahui nilai ketimpangan distribusi pendapatan terendah dan tertinggi dari semua Kabupaten/ Kota di D.I Yogyakarta. Nilai ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi dimiliki kota Jogja yaitu sebesar 0.843327 dan nilai ketimpangan distribusi pendapatan terendah yaitu Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 0.552381

Tabel 4.8
Period Effect

Fixed Effect(Period)

2009—C	-0.000917
2010—C	0.002294
2011—C	0.047081
2012—C	0.037505
2013—C	-0.021672
2014—C	-0.031046
2015—C	-0.033245

Persamaan Regresi

$$Y_{it} = 0.683594 - 0.000917 - 0.00 X_{1it} + 1.25X_{2it} + 2.90 X_{3it} - 4.38 X_{4it} + U_{it}$$

$$= 0.452677$$

$$Y_{it} = 0.683594 + 0.002294 - 0.00 X_{1it} + 1.25X_{2it} + 2.90 X_{3it} - 4.38 X_{4it} + U_{it}$$

$$= 0.455884$$

$$Y_{it} = 0.683594 + 0.047081 - 0.00 X_{1it} + 1.25X_{2it} + 2.90 X_{3it} - 4.38 X_{4it} + U_{it}$$

$$= 0.500675$$

$$Y_{it} = 0.683594 + 0.037505 - 0.00 X_{1it} + 1.25X_{2it} + 2.90 X_{3it} - 4.38 X_{4it} + U_{it}$$

$$= 0.491099$$

$$Y_{it} = 0.683594 - 0.021672 - 0.00 X_{1it} + 1.25X_{2it} + 2.90 X_{3it} - 4.38 X_{4it} + U_{it}$$

$$= 0.431922$$

$$Y_{it} = 0.683594 - 0.031046 - 0.00 X_{1it} + 1.25X_{2it} + 2.90 X_{3it} - 4.38 X_{4it} + U_{it}$$

$$= 0.422548$$

$$Y_{it} = 0.683594 - 0.033245 - 0.00 X_{1it} + 1.25X_{2it} + 2.90 X_{3it} - 4.38 X_{4it} + U_{it}$$

$$= 0.420354$$

Dari hasil tersebut dapat dilihat angka ketimpangan distribusi pendapatan setiap tahunnya di provinsi D.I Yogyakarta. Pada tahun 2009 ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.452677, pada tahun 2010 angka ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.455884, tahun 2011 ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.500675, pada tahun 2012 angka ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.491099, pada tahun 2013 ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.431922, pada tahun 2014 ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.422548 dan tahun 2015 ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.420354. Hal ini menunjukkan bahwa angka ketimpangan distribusi pendapatan setiap tahunnya di provinsi D.I Yogyakarta berfluktuasi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan namun pada tahun 2012 ke tahun 2015 mengalami penurunan.

4.4 Analisis Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

4.4.1. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta

Dari hasil regresi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki probabilitas $0.0544 < \alpha 5\%$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a yang berarti berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/ Kota di D.I Yogyakarta hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya apabila nilai Indeks Pembangunan

Manusia naik maka akan diikuti oleh menurunkan nilai ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/ Kota Provinsi D.I Yogyakarta. Indeks Pembangunan Manusia secara khusus merupakan mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan. Dengan adanya peningkatan IPM diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin membesar antar daerahnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi Eka Putrid an Syamsul Amar yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

4.4.2 Analisis Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta

Dari hasil regresi yang telah dilakukan diketahui bahwa PDRB memiliki probabilitas sebesar $0.0001 < \alpha 5\%$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Kabupaten/Kota. Artinya jika PDRB mengalami peningkatan maka nilai ketimpangan distribusi pendapatan juga akan mengalami peningkatan. Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Kenaikan nilai PDRB di Kabupaten/ Kota menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nita Tri Hartinidi tahun 2016 yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah yang paling berperan dalam mengelola pendapatan asli daerah sehingga dapat sepenuhnya digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.4.3 Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta

Dana Alokasi Umum memiliki probabilitas sebesar $0.0053 < \alpha 5\%$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a yang berarti berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di D.I Yogyakarta hal ini menunjukkan jika Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan maka ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota juga akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan setiap Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah salah satunya untuk belanja modal. Kenaikan dana alokasi umum ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai

ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu dan Ketut (2013) yang menyatakan bahwa dengan adanya dana alokasi umum yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Pemberian DAU oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah. Alokasi DAU untuk belanja pembangunan memungkinkan sesuatu daerah untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain belanja pembangunan, belanja modal juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

4.4.4 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta

Dari hasil regresi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki probabilitas $0.0066 < \alpha 5\%$ maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/ Kota di D.I Yogyakarta hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya apabila nilai Pendapatan Asli Daerah naik maka akan menaikkan nilai ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/ Kota Provinsi D.I Yogyakarta. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak, retribusi, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya peningkatan PAD pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dapat mengoptimalkan PAD. Peningkatan PAD dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Peran pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin membesar antar daerahnya. Hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu dan Ketut (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Kenaikan nilai ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/ Kota menunjukkan adanya ketidakmerataan penghasilan di Kabupaten/Kota tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPILIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model estimasi regresi data panel yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect* setelah dilakukan uji Hausman. Hasil koefisien uji determinasi (R^2) adalah sebesar 0.844575 yang artinya sebanyak 84.45% variasi atau perubahan pada variabel ketimpangan distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah sedangkan sisanya sebesar 15.55% dijelaskan oleh sebab lain di luar model.
2. Berdasarkan Uji Overall (Uji F) nilai F statistic sebesar 17.66043 dengan probabilitas $0.000000 < \alpha 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah secara bersama sama mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya jika IPM mengalami peningkatan maka ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami penurunan. IPM berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi D.I Yogyakarta hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi D.I Yogyakarta memusatkan

kualitas pada setiap individu yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat di dalam suatu daerah mendapatkan kesejahteraan yang merata maka nilai ketimpangan distribusi pendapatan akan turun itu artinya penghasilan akan semakin merata.

4. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya jika PDRB mengalami peningkatan maka ketimpangan distribusi pendapatan juga akan mengalami peningkatan. PDRB berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini bisa terjadi karena barang atau jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di masing-masing daerah sesuai dengan nilai PDRB yang dihasilkan di daerah tersebut.
5. Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya jika DAU mengalami peningkatan maka ketimpangan distribusi pendapatan juga akan mengalami peningkatan. Kenaikan Dana Alokasi umum ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan saran prasarana oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada ketidakmerataan penghasilan di Kabupaten/Kota tersebut dengan kenaikan nilai ketimpangan pendapatan
6. Variabel Pendapatan Asli Daerah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya jika PAD mengalami kenaikan maka ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami penurunan. Peningkatan PAD dapat

menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena dengan adanya peningkatan PAD pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan PAD karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan

5.2 Implikasi

1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya jika IPM mengalami kenaikan maka ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami penurunan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari berbagai sektor seperti Pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita. Selain itu juga harus ada pengawasan dari pemerintah pusat dan masyarakat agar terwujud IPM yang berkualitas sehingga dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat daerah.
2. PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya nilai PDRB berarti barang atau jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di masing-masing daerah juga tinggi. Maka pemerintah diharapkan melakukan pengawasan dan pengontrolan agar tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata.
3. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang artinya jika dana alokasi umum mengalami peningkatan maka juga akan meningkatkan nilai ketimpangan distribusi pendapatan. Dana

alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sehingga perlu adanya pengawasan dan pengontrolan agar penggunaan dana alokasi umum tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor seperti penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu juga harus ada pengawasan dari pemerintah pusat dan masyarakat agar realisasi PAD optimal sehingga dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemakamuran masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Tristiana, Dewi (2015), "Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Kredit Perbankan, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta"
- Valentina, Ni Putu dan I Ketut (2013), "Pengaruh Pendapatan Asli, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Bali" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 4. No 1, Januari 2014
- Pauzi, Ahmad dan Dewa (2016), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SecaraLangsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 5. No 6, Juni 2016
- Widianarko,Agung (2013), "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan DanFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 1990-2010"
- Eka,Yosi dan Syamsul, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia"
- Linggar dan Achmad, "Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007"
- Musfidar, Ma,mun (2012), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi DistribusiPendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010"
- Sudarian (2015), " Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia" *Jurnal Eksis*, Volume 11. No 1, April 2015
- Yuliani, Tutik (2014), " Petumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur" *Journal of Economics and Policy*, Volume 7i1. November 2014
- Nurlaili, Ani (2016), "Analisis FAktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013"
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1954. *Ekonomi Pembangunan*. PT Pembangunan : Jakarta.
- Parhah, Siti (2006), " Pengaruh Variabel Makroekonomi Indonesia TerhadapDidtribusi Pendapatan Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi*, Volume XXXI. No 12, Februari

- Mega (2016), "Analisis Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat"
Bantika, Vredrich "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan
Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Utara"
- Krisnantia, Narian (2014), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Antar Wilayah
Di Provinsi Jawa Timur Dan D.I Yogyakarta"
- Retnosari, Devi (2006), "Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat"
- Hidayat, Muhammad Haris (2014), "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Investasi, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012"
- Pradnyadewi, Diah Dan Ide Bagus (2017) "Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur,
Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan Di Provinsi Bali" Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 6. No
2, Februari 2017
- Naim, Zahratul Dan Citra, "Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran Dan
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota
Padang"
- Hartini, Nita Tri (2017), "Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi, Dan Indeks
Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015"
- Holifah (2017), "Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015"
- Arifianto, Wildan Dan Imam, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Distribusi Pendapatan Di Indonesia"
- Soemartini Dan Enny Supartini (2016), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Melalui Korelasi
Kanonik"
- Tiara, Shita (2014), "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi
Sumatera Utara"
- Nangarumba, Muara (2015), "Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah
Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan
Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014" JESP,
Volume 7. No 2 November 2015

- Sukirno, Sadono. (2006). “*Makroekonomi: Pengantar Teori*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. “*Gini Ratio Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tahun 2009-2015*”. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. “*Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kotadi D.I Yogyakarta tahun 2009-2015*”. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. “*Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kotadi D.I Yogyakarta tahun 2009-2015*”. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. “*Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kotadi D.I Yogyakarta tahun 2009-2015*”. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. “*PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten/Kotadi D.I Yogyakarta tahun 2009-2015*”. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta
- Aulia, Nely (2012), “Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2012”
- Rahmawati, Nurul (2013), “Perubahan Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat 2008-2011”
- Fitrian, Morsi (2015), “Anasilis Pengaruh *Aggregat Demand* dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh”
- Aisyah (2003), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus 26 Provinsi di Indonesia)”
- Linda (2007), “Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”
- Hendra, Achmad (2011) “ Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah”
- Doni Dan Rokhedi (2013), “Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia 2006-2011” *Journal Of Economics And Policy*
- Putu, Ngakan (2013), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar”

- Yunita, Vebby (2014) "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Provinsi Riau" Volume 1. No 2
- Ayu, Ida (2014), "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali" Volume 3. No 2
- Lestari (2016), "Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia" Volume 20. No 1
- Annisa, Syarifah (2007), "Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2010-2015" Volume 6. No 21
- I Gusti (2014), "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali" Volume 13. No 8
- Adhitya (2017), "Dampak Transfer Pemerintahan Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia"

LAMPIRAN

Data Skripsi

TAHUN	KAB/KOTA	IG	IPM (%)	PDRB (juta rupiah)	PAD (ribu rupiah)	DAU (ribu rupiah)
2009	kota jogja	0.38	79.29	10,607,237	161,482,440	414,345,330
2010	kota jogja	0.41	79.52	11,777,579	179,423,640	395,444,060
2011	kota jogja	0.4	82.98	12,962,435	228,833,290	436,129,820
2012	kota jogja	0.43	83.29	14,327,564	338,839,610	536,466,615
2013	kota jogja	0.44	83.61	22,537,792	385,920,170	597,212,216
2014	kota jogja	0.42	83.78	24,664,285	470,634,760	618,742,352
2015	kota jogja	0.45	84.56	26,792,641	510,548,830	622,365,350
2009	Sleman	0.29	77.7	12,503,760	157,321,267	587,857,778
2010	Sleman	0.27	78.2	13,611,725	163,632,984	563,320,892
2011	Sleman	0.41	80.04	23,764,366	226,723,271	631,920,733
2012	Sleman	0.46	80.1	25,732,248	301,069,539	795,708,767
2013	Sleman	0.44	80.26	28,295,362	455,998,564	891,589,912
2014	Sleman	0.42	80.73	31,013,893	573,337,599	952,102,502
2015	Sleman	0.45	81.2	33,826,505	643,130,079	984,410,612
2009	Bantul	0.25	73.75	8,147,860	88,691,362	568,502,143
2010	Bantul	0.27	74.53	9,076,401	81,637,099	573,512,337
2011	Bantul	0.37	75.79	13,290,666	128,900,086	625,060,827
2012	Bantul	0.4	76.13	14,510,832	166,597,778	768,034,584
2013	Bantul	0.4	76.78	16,138,755	224,197,864	854,810,634
2014	Bantul	0.39	77.11	17,682,924	357,411,062	949,252,188
2015	Bantul	0.38	77.99	19,325,203	390,624,492	942,850,827
2009	kulonprogo	0.25	73.77	3,286,278	39,358,629	413,081,642
2010	kulonprogo	0.24	74.49	3,547,055	48,190,801	411,293,618
2011	kulonprogo	0.38	69.53	5,500,250	53,752,293	444,043,865
2012	kulonprogo	0.41	69.74	5,916,574	74,028,663	531,104,016
2013	kulonprogo	0.33	70.14	6,489,593	95,991,512	594,978,790
2014	kulonprogo	0.36	70.68	7,056,571	158,623,927	639,409,211
2015	kulonprogo	0.37	71.52	7,671,548	170,822,326	657,260,489

2009	gunungkidul	0.23	70.18	5,987,782	38,455,406	508,212,308
2010	gunungkidul	0.25	70.45	9,808,630	42,521,521	521,293,704
2011	gunungkidul	0.32	64.83	9,739,094	54,462,418	572,008,916
2012	gunungkidul	0.35	65.69	10,545,354	67,050,781	687,944,489
2013	gunungkidul	0.33	66.31	11,530,340	83,427,448	779,069,238
2014	gunungkidul	0.36	67.03	12,557,371	159,304,338	847,388,294
2015	gunungkidul	0.32	67.41	13,798,656	196,099,244	872,566,961

Hasil Regresi

1. Common Effect Models

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/13/18 Time: 14:26

Sample: 2009 2015

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM?	0.003701	0.000430	8.596820	0.0000
PDRB?	1.85E-09	2.89E-09	0.641767	0.5257
DAU?	5.49E-11	5.60E-11	0.980410	0.3345
PAD?	8.86E-11	1.31E-10	0.674793	0.5048
R-squared	0.509024	Mean dependent var		0.360857
Adjusted R-squared	0.461510	S.D. dependent var		0.068487
S.E. of regression	0.050257	Akaike info criterion		-3.036132
Sum squared resid	0.078298	Schwarz criterion		-2.858378
Log likelihood	57.13231	Hannan-Quinn criter.		-2.974771
Durbin-Watson stat	1.036653			

2. Fixed Effect Models

Dependent Variable: IG?

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/13/18 Time: 14:35

Sample: 2009 2015

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	0.683594	0.308936	2.212736	0.0359
IPM?	-0.007915	0.003928	-2.014824	0.0544
PDRB?	1.25E-08	2.72E-09	4.592258	0.0001
DAU?	2.90E-10	9.51E-11	3.046049	0.0053
PAD?	-4.38E-10	1.48E-10	-2.955507	0.0066
Fixed Effects (Cross)				
_KOTA_JOGJA--C	0.159733			
_SLEMAN--C	-0.027537			
_BANTUL--C	-0.033970			
_KULONPROGO--C	0.032987			
_GUNUNGKIDUL--C	-0.131213			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.844575	Mean dependent var	0.360857	
Adjusted R-squared	0.796752	S.D. dependent var	0.068487	
S.E. of regression	0.030876	Akaike info criterion	-3.900651	
Sum squared resid	0.024786	Schwarz criterion	-3.500704	
Log likelihood	77.26139	Hannan-Quinn criter.	-3.762589	
F-statistic	17.66043	Durbin-Watson stat	1.801157	
Prob(F-statistic)	0.000000			

3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.063984	(4,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	38.566085	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IG?

Method: Panel Least Squares

Date: 02/13/18 Time: 20:45

Sample: 2009 2015

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.307095	0.251923	1.219007	0.2323
IPM?	-7.56E-05	0.003127	-0.024173	0.9809
PDRB?	2.81E-09	2.97E-09	0.946694	0.3514
DAU?	-3.51E-11	9.24E-11	-0.379565	0.7069
PAD?	1.95E-10	1.57E-10	1.242998	0.2235

R-squared	0.532196	Mean dependent var	0.360857
Adjusted R-squared	0.469822	S.D. dependent var	0.068487
S.E. of regression	0.049867	Akaike info criterion	-3.027334
Sum squared resid	0.074603	Schwarz criterion	-2.805142
Log likelihood	57.97835	Hannan-Quinn criter.	-2.950633
F-statistic	8.532339	Durbin-Watson stat	0.995170
Prob(F-statistic)	0.000101		

4. Random Effect Models

Dependent Variable: IG?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/13/18 Time: 14:34
Sample: 2009 2015
Included observations: 7
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 35
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.307095	0.155980	1.968812	0.0583
IPM?	-7.56E-05	0.001936	-0.039042	0.9691
PDRB?	2.81E-09	1.84E-09	1.529000	0.1367
DAU?	-3.51E-11	5.72E-11	-0.613033	0.5445
PAD?	1.95E-10	9.70E-11	2.007560	0.0538
Random Effects (Cross)				
_KOTA_JOGJA--C	3.34E-15			
_SLEMAN--C	-2.99E-15			
_BANTUL--C	-4.20E-16			
_KULONPROGO--C	2.54E-15			
_GUNUNGKIDUL--C	-2.48E-15			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		4.46E-09	0.0000
Idiosyncratic random		0.030876	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.532196	Mean dependent var	0.360857
Adjusted R-squared	0.469822	S.D. dependent var	0.068487
S.E. of regression	0.049867	Sum squared resid	0.074603
F-statistic	8.532339	Durbin-Watson stat	0.995170
Prob(F-statistic)	0.000101		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.532196	Mean dependent var	0.360857
Sum squared resid	0.074603	Durbin-Watson stat	0.995170

5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: RANDOM
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	52.255936	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IPM?	-0.007915	-0.000076	0.000012	0.0218
PDRB?	0.000000	0.000000	0.000000	0.0000
DAU?	0.000000	-0.000000	0.000000	0.0000
PAD?	-0.000000	0.000000	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IG?

Method: Panel Least Squares

Date: 02/13/18 Time: 20:51

Sample: 2009 2015

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.683594	0.308936	2.212736	0.0359
IPM?	-0.007915	0.003928	-2.014824	0.0544
PDRB?	1.25E-08	2.72E-09	4.592258	0.0001
DAU?	2.90E-10	9.51E-11	3.046049	0.0053
PAD?	-4.38E-10	1.48E-10	-2.955507	0.0066

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.844575	Mean dependent var	0.360857
Adjusted R-squared	0.796752	S.D. dependent var	0.068487
S.E. of regression	0.030876	Akaike info criterion	-3.900651
Sum squared resid	0.024786	Schwarz criterion	-3.500704
Log likelihood	77.26139	Hannan-Quinn criter.	-3.762589
F-statistic	17.66043	Durbin-Watson stat	1.801157
Prob(F-statistic)	0.000000		